



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2020



DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
Jl. Pahlawan Rawang Painan

Nomor : 600 / 26 /Perkimtan-PS/I/2021
Lampiran :
Perihal : **LPPD Tahun 2020**

Painan, 29 Januari 2021

Kepada.
Yth. Bupati Pesisir Selatan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Bupati Pesisir Selatan No: 100/13/Pem-Otda/I/2021 tanggal 05 Januari 2021 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak LPPD Tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Pesisir Selatan



INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN

1. Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Usuran Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi}} \times 100\%$	$\frac{\text{...}}{\text{...}} \times 100\% = \text{...}$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Usuran Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2020)	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Pertanahan	1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	$\frac{\text{Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee}}{\text{Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	$\frac{\text{Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee}}{\text{Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	4)	Dokumen izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak $\frac{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah dokumen izin membuka tanah yang ditolak}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	5)	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik $\frac{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)		Rumus		Capaian Kinerja 2020		Keterangan
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum $\frac{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	Tidak Ada	
	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum				Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)		Rumus		Capaian Kinerja 2020		Keterangan
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi}}{\text{Luas izin lokasi yang diterbitkan}} \times 100\%$	Tidak Ada	
	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal				Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)		Rumus		Capaian Kinerja 2020		Keterangan
No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	Tidak Ada	
	Pertanahan	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee				Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Tersedianya tanah untuk masyarakat

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\% = \text{---}$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
				Tidak Ada	

6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Pertanahan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	$\frac{3}{3} \times 100\% = 100$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Kab. Pesisir Selatan



NP. 19640128 199309 1 001

INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	- - x 100% = Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	-	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	6)	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	7)	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	8)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	9)	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	x 100% = Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintah Perumahan Rakyat	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
		1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitas penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	-	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	140.21	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	2.141	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah luasan (ha) penanganan Infrastruktur kawasan kumuh	0.1315	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

4. Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	Berkurangnya Jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk+jumlah rumah yang lumpur tinjanya dioleh di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya dioleh di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{114.174}{114.308} \times 100\% = 99.88$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1)	Jumlah rumah di kab/kota	Cukup jelas	114,308 Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2)	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Cukup jelas	2,141 Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3)	Jumlah rumah tidak layak huni	Cukup jelas	134 Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Cukup jelas	Tidak Ada Data Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5)	Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah Total Unit Rumah}} \times 100\%$	108.35 Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		6)	Jumlah rumah yang tidak dihuni	Cukup jelas	Tidak Ada Data Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU x 100%	$\frac{275}{114.308} \times 100\% = 0.241$	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
			Jumlah unit rumah kab/kota		

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Perumahan Rakyat	1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Dikerjakan Oleh PU	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	275	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		4) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	525	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	5	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

	6)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Dikerjakan Oleh Dinas Perhubungan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	7)	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	8)	Jumlah pengembang yang teregistrasi	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	9)	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

Pajanan, 29 Januari 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Kampung, Pesisir-Selatan





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

JL. Pahlawan Rawang Painan No.

TELP. (0756)

e-MAIL : dperkimtanps@gmail.com

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKHRIDAL, SH
NIP : 19640128 199309 1 001
Pangkat / Gol : Pembina
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Dengan ini menyatakan bahwa :

No	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome
1	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya 2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam 3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam 4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi 5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi 6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi 7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana 8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi 9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM 2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM 3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM

No	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome
2	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Tersedianya tanah untuk masyarakat	4 Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM 6 Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah
			1. SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota 2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek 3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee 4 Dokumen Izin membuka tanah 5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota
			1 Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum 2. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
			1. Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi 2. Luas izin lokasi yang diterbitkan
			1. Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 2. Jumlah penerima tanah obyek landreform
			1 Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah 2 Luas izin membuka tanah yang diterbitkan

No	Urusan	IKK Outcome	IKK Outcome
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU 2. Jumlah pengembang yang tersertifikasi 3. Jumlah pengembang yang teregistrasi 4. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan

Alasan Data tidak bisa dimunculkan

No	Indikator Kinerja Kunci	Alasan
A	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana kabupaten/Kota	
1.	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Tidak ada program/kegiatan Pendataan dan Penanganan Rumah yang berada pada kawasan rawan bencana
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Tidak ada program/kegiatan Penanganan Rumah akibat bencana alam
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Tidak ada program/kegiatan pendataan dan laporan terkait RT, KK dan Jiwa Korban yang terkena bencana alam
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada program/kegiatan penanganan rehabilitasi rumah akibat bencana
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada program/kegiatan pendataan jumlah rumah korban bencana yang dibangun
6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada program/kegiatan pendataan jumlah rumah korban bencana yang dibangun baru atau direlokasi
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada program/kegiatan pendataan jumlah dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Tidak ada program/kegiatan Fasilitasi pendataan dan laporan RT, KK dan Jiwa Korban Bencana
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak ada program/kegiatan Pengadaan Pencadangan Lahan

No	Indikator Kinerja Kunci	Alasan
B	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	
1.	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada program/kegiatan pendataan dan pelaksanaan fasilitasi ganti kerugian aset properti
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada program/kegiatan pendataan dan pelaksanaan fasilitasi ganti kerugian aset properti
3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada program/kegiatan Layanan Subsidi Uang Sewa
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada program/kegiatan Rehabilitasi Rumah Akibat Korban Bencana
5.	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada program/kegiatan Pembangunan Kembali Rumah Korban Bencana
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Tidak ada program/kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Relokasi Korban Bencana
C	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	
1.	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Tidak ada rekomendasi penerbitan SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Tidak ada rekomendasi penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek oleh Bupati
3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Tidak ada rekomendasi penerbitan SK Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee oleh Bupati
4	Dokumen Izin membuka tanah	Belum Ada Dokumen
5.	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Belum Ada Dokumen
D	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
1	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tidak ada program/kegiatan Pendataan Jumlah Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
2.	Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Tidak ada program/kegiatan Pendataan Jumlah Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum
E	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	
1.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	Tidak ada program/kegiatan Pendataan Luas Tanah Yang Telah Dimanfaatkan Sesuai Dengan Peruntukannya diatas izin lokasi
2.	Luas izin lokasi yang diterbitkan	Tidak ada program/kegiatan Pendataan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan

No	Indikator Kinerja Kunci	Alasan
F	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	
1.	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	Tidak ada program/kegiatan Pendataan Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha.
2.	Jumlah penerima tanah obyek landreform	Tidak ada program/kegiatan Pendataan Jumlah penerima tanah obyek landreform
G	Tersedianya tanah untuk masyarakat	
1.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	Tidak Ada Rekomendasi Izin membuka tanah dikerjakan tahun 2020
2.	Luas izin membuka tanah yang diterbitkan	belum ada data luas izin membuka tanah yang diterbitkan

Painan, 29 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH PENANGANAN AIR LIMBAH SETEMPAT (ALS)
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2020**

NO	LOKASI	JUMLAH PENANGANAN ALS TAHUN 2020	KET.
1	2	3	4
1	KOTO XI TARUSAN	75	
4	IV JURAI	75	
8	RANAH PESISIR	75	
9	LINGGO SARI BAGANTI	100	
10	AIR PURA	100	
11	PANCUNG SOAL	100	
	JUMLAH	525	

Painan, 29 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan



MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640428 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH LUAS PENANGANAN KAWASAN KUMUH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2020**

NO	Pekerjaan	Luas Tertangani	Ket
1	2	3	4
1	Pembangunan Drainase Lubuk Sarik kec. Lengayang	0.01208	
2	Pembangunan Jalan Kp. Rantau Simalenang	0.1194	
Jumlah		0.13148	

Painan, 29 Januari 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan


MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH KASUS KONFLIK PERTANAHAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2020**

NO	KASUS	LOKASI	SELESAI/TIDAK SELESAI	KET.
1	2	3	4	5
1	Penyeselaian Masalah tanah Pertanian Punggasan	Linggo Sari Baganti	Selesai	
2	Penyelesaian Masalah Tanah Daerah Irigasi Batang Tarusan	Koto XI Tarusan	Selesai	
3	Penyelesaian Masalah Tanah Balai Penyuluhan Kecamatan Padang Laban Pasia Pelangai	Ranah Pesisir	Selesai	

Painan, 29 Januari 2021
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan


MUKHEIDAL SH
NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH RUMAH YANG TERFASILITASI PSU
DINAS PERKIMTAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2020**

NO	NAMA PSU	LOKASI	JUMLAH UNIT RUMAH	KET.
1	2	3	4	5
1	PSU Perumahan Bumi Sago Damai I	IV Jurai	50	
2	PSU Rumah Khusus Nelayan Kecamatan Batang Kapas	Batang Kapas	75	
3	PSU Perumahan Puri Indah Lestari Bunga Pasang	IV Jurai	70	
4	PSU Rumah Khusus Nelayan Kecamatan Lengayang	Lengayang	30	
5	PSU Rumah Khusus Nelayan Kecamatan Linggo Sari Baganti	Linggo Sari Baganti	50	
Jumlah			275	

Painan, Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kab. Pesisir Selatan


MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

**DAFTAR JUMLAH RUMAH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEADAAN TAHUN 2020**

NO	LOKASI	JUMLAH PENANGANA N RTLH TAHUN 2020	JUMLAH RUMAH	JUMLAH RTLH 2020	JUMLAH RLH	KET.
1	2		3	4	5	6
1	KOTO XI TARUSAN	64	14,643	0	14,643	
2	BAYANG	300	1,452	0	1,452	
3	BAYANG UTARA	64	9,637	11	9,626	
4	IV JURAI	392	6,792	0	6,792	
5	BATANG KAPAS	86	11,697	1	11,696	
6	SUTERA	120	13,356	35	13,321	
7	LENGAYANG	71	16,171	87	16,084	
8	RANAH PESISIR	93	10,302	0	10,302	
9	LINGGO SARI BAGANTI	283	7,801	0	7,801	
10	AIR PURA	211	3,226	0	3,226	
11	PANCUNG SOAL	159	5,205	0	5,205	
12	BASA IV BALAI TAPAN	145	2,460	0	2,460	
13	RANAH AMPEK HULU TAPAN	108	3,152	0	3,152	
14	LUNANG	25	5,043	0	5,043	
15	SILAUT	20	3,371	0	3,371	
	JUMLAH	2,141	114,308	134	114,174	

Painan, 29 Januari 2021

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kab. Pesisir Selatan

MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001





**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 448 /Kpts/BPT-PS/2018**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENANGANAN LINGKUNGAN
KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah kabupaten yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan dan dengan melibatkan peran masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa mempedomani dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan (RP2KPKP) Kabupaten Pesisir Selatan yang telah disusun, perlu menetapkan lokasi penanganan lingkungan kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Penanganan Lingkungan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Berdasarkan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan,
Pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 448 /Kpts/BPT-PS/2018
TANGGAL : 17 OKTOBER 2018
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENANGANAN
LINGKUNGAN KAWASAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

A. kawasan kumuh perkotaan

No.	Kecamatan	Nagari	Klasifikasi Kumuh	Luas (ha)
1.	Bayang	Pasar Baru	Sedang	12,58
2.	IV Jurai	Sago	Ringan	8,34
		Salido	Ringan	18,95
		Painan Selatan	Sedang	19,17
		Lumpo	Ringan	9,08
3.	Batang Kapas	IV Koto Hilie	Ringan	11,72
4.	Sutera	Surantih	Sedang	13,72
5.	Lengayang	Kambang Utara	Ringan	10,26
		Kambang	Sedang	11,67
		Kambang Barat	Sedang	17,24
		Kambang Timur	Sedang	9,64
		Lakitan	Sedang	11,65
6.	Linggo Sari Baganti	Airhaji	Sedang	9,56
7.	Airpura	Tanah Bakali Indersapura	Ringan	10,75
8.	Basa Ampek Balai Tapan	Batang Betung Tapan	Sedang	17,93
		Batang Arah Tapan	Ringan	11,04
9.	Ranah Ampek Hulu Tapan	Sungai Pinang Tapan	Ringan	7,27
10.	Silaut	Silaut	Ringan	11,59

No.	Kecamatan	Nagari	Klasifikasi Kumuh	Luas (ha)
8	Pancung Soal	Muara Sakai Inderapura	Sedang	8,97
		Tiga Sepakat Inderapura	Ringan	6,49
9	Ranah Ampek Hulu Tapan	Talang Balirik Tapan	Ringan	6,74
10	Lunang	Pondok Parian Lunang	Ringan	11,57
		Lunang Tiga (Tanjung Sari)	Ringan	10,87
11	Silaut	Sambungo	Ringan	13,41


BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

B. kawasan kumuh perdesaan

No.	Kecamatan	Nagari	Klasifikasi Kumuh	Luas (ha)
1.	Koto XI Tarusan	Siguntur	Sedang	8,89
		Sungai Pinang	Sedang	10,14
		Mandeh	Sedang	4,30
		Barung Barung Balantai	Sedang	7,97
		Carocok Anau Ampang Pulai	Sedang	4,13
		Ampang Pulai	Ringan	5,24
2.	Bayang	Api-API Pasar Baru	Ringan	3,93
		Koto Berapak	Sedang	17,90
		Kubang Koto Berapak	Sedang	11,44
3.	IV Nagari Bayang Utara	Pancung Taba	Sedang	3,92
4.	Batang Kapas	Koto Nan Duo IV Koto Hilie	Ringan	14,06
		IV Koto Mudiek	Sedang	3,28
		Tuik IV Koto Mudiak	Ringan	10,67
		Teratak Tempatih IV Koto Mudiak	Sedang	13,35
		Taluak	Sedang	9,38
5.	Sutera	Gantiang Mudiak Selatan Surantih	Sedang	13,23
		Rawang Gunung Malelo Surantih	Ringan	4,89
		Aur Duri Surantih	Sedang	6,44
6.	Ranah Pesisir	Nyiur Melambai Pelangai	Ringan	6,70
7.	Linggo Sari Baganti	Punggasan Utara	Sedang	18,88
		Muara Kandis Punggasan	Sedang	5,05
		Rantau Simalenang Air Haji	Sedang	18,22